

Fragmentasi Sistem Kepartaian dan Krisis Representasi Rakyat dalam Politik Indonesia Modern

Dea Natasya Putri¹
Repki Hidayah Tulla²
Fajar Rahman Sofyan³
Rudi Santoso⁴

Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung,
Indonesia.

Deanatsyaputri06@gmail.com
repkihidayatulla215@gmail.com
Fajarrahmansofyan44@gmail.com
rudisantoso@radenintan.ac.id

Abstrak

Fragmentasi sistem kepartaian dalam politik Indonesia modern menjadi persoalan penting yang memengaruhi kualitas demokrasi. Munculnya banyak partai politik pasca reformasi memang membuka ruang pluralisme, namun juga menimbulkan inefisiensi dalam pengambilan kebijakan serta melemahnya stabilitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak fragmentasi sistem kepartaian serta kaitannya dengan krisis representasi rakyat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengkaji regulasi, praktik politik, serta persepsi masyarakat terhadap partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya fragmentasi partai, lemahnya kelembagaan partai, serta dominasi elit politik menjadi faktor utama menurunnya kemampuan partai dalam merepresentasikan kepentingan rakyat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem kepartaian melalui penguatan regulasi, peningkatan demokrasi internal partai, serta transparansi dan akuntabilitas. Upaya tersebut diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan partai politik berfungsi optimal dalam sistem demokrasi.

Kata Kunci:

Fragmentasi Partai, Representasi Politik, Demokrasi, Indonesia

Abstract

The fragmentation of the party system in modern Indonesian politics has become a crucial issue affecting the quality of democratic governance. The emergence of multiple political parties following the reform era has encouraged political pluralism, yet it has also led to inefficiencies in policy-making and weakened political stability. This study aims to analyze the causes and consequences of party system fragmentation and its relation to the crisis of political representation in Indonesia. Using a normative-empirical approach, this research examines legal frameworks, political practices, and public perceptions toward political parties. The findings indicate that excessive party fragmentation, weak party institutionalization, and elite-oriented politics have contributed significantly to the declining ability of political parties to represent public interests. Consequently, public trust in political institutions continues to deteriorate. This study highlights the urgency of reforming political party systems through strengthening regulations, improving internal democracy, and enhancing accountability. These reforms are essential to restore public trust and ensure that political parties effectively serve as channels of representation in a democratic system.

Key Word:

Party System Fragmentation, Political Representation, Democracy, Indonesia

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Sistem kepartaian merupakan elemen fundamental dalam demokrasi modern karena berfungsi sebagai sarana utama penyaluran aspirasi rakyat serta pembentukan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, sistem kepartaian mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi 1998 yang membuka ruang kebebasan politik secara luas. Perubahan ini mendorong lahirnya berbagai partai politik dengan latar belakang ideologi dan kepentingan yang beragam. Di satu sisi, kondisi tersebut memperkuat pluralisme politik, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya fragmentasi sistem kepartaian (Bakry et al., 2024; Judijanto et al., 2025).

Fragmentasi sistem kepartaian merujuk pada kondisi tersebarunya kekuatan politik ke dalam banyak partai dengan kekuatan relatif kecil (Abadi & Arsil, 2022; Ahmad, 2025). Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, fragmentasi sering dianggap sebagai konsekuensi logis dari demokrasi yang terbuka. Namun demikian, tingkat fragmentasi yang tinggi justru berimplikasi pada melemahnya efektivitas pemerintahan, terutama dalam membangun koalisi yang stabil serta dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses legislasi, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang cenderung kompromistis dan kurang optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, fragmentasi kepartaian juga berkaitan erat dengan menurunnya kualitas representasi politik. Secara ideal, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Namun dalam praktiknya, banyak partai politik justru lebih berorientasi pada kepentingan elit dan strategi elektoral dibandingkan dengan aspirasi publik. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi partai politik dari representasi kepentingan rakyat menuju alat perebutan dan mempertahankan kekuasaan (Rahayu et al., 2024; Silitonga & Gaol, 2025).

Kondisi tersebut berkontribusi pada munculnya krisis representasi dalam politik Indonesia modern. Krisis ini ditandai dengan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik serta melemahnya legitimasi institusi politik. Praktik politik transaksional, korupsi, dan dominasi oligarki memperkuat persepsi bahwa partai politik tidak lagi menjadi representasi rakyat, melainkan instrumen kepentingan kelompok tertentu (Prayugo & Prayitno, 2026; Rohmandar, 2025). Akibatnya, terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara rakyat dan wakil politiknya.

Selain itu, faktor institusional seperti sistem pemilu proporsional terbuka dan lemahnya kelembagaan partai turut memperparah fragmentasi. Sistem pemilu memberikan peluang besar bagi partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, sementara lemahnya institusionalisasi menyebabkan partai tidak memiliki struktur dan ideologi yang kuat serta cenderung bergantung pada figur tertentu. Kondisi ini memicu konflik internal dan memperbesar kemungkinan terjadinya fragmentasi lanjutan (Salsabila, 2025).

Dampak lebih lanjut dari fragmentasi dan krisis representasi adalah meningkatnya apatisme politik masyarakat serta menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik (Indikator Politik Indonesia, 2024). Hal ini tidak hanya mengancam kualitas partisipasi politik, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi demokrasi secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan publik yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas karena dipengaruhi oleh kepentingan elit politik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak fragmentasi sistem kepartaian serta kaitannya dengan krisis representasi rakyat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kelemahan dalam sistem kepartaian serta merumuskan rekomendasi reformasi guna memperkuat fungsi representasi partai politik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu dalam berbagai kegiatan tanpa mengharapkan imbalan. Secara umum, program ini dirancang oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-politik, khususnya terkait fragmentasi sistem kepartaian dan krisis representasi rakyat dalam konteks demokrasi Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis realitas sosial secara holistik dan menekankan pada pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti (Juita et al., 2025; Subakti et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga survei, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan mencakup kajian tentang sistem kepartaian, demokrasi, oligarki politik, serta tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia (Prayugo & Dora, n.d., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai sumber literatur yang relevan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sistematis dan mendalam terkait fenomena yang diteliti, serta untuk memperkuat kerangka teoritis penelitian (Fitriyana & Muspawi, 2024; M.Pd et al., n.d.).

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data dalam bentuk narasi analitis; dan (3) penarikan kesimpulan. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan (Nurrisa et al., 2025; Qomaruddin & Sa'diyah, n.d.).

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara fragmentasi sistem kepartaian, lemahnya institusionalisasi partai, dominasi elit politik, serta dampaknya terhadap krisis representasi dan menurunnya kepercayaan publik dalam sistem demokrasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Fragmentasi Kepartaian

Fragmentasi kepartaian di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak era reformasi 1998 yang membuka kebebasan dalam pembentukan partai politik. Sistem multipartai yang terbuka mendorong banyaknya partai yang berpartisipasi dalam pemilu, sehingga distribusi kekuasaan politik menjadi semakin tersebar dan tidak terpusat pada satu kekuatan dominan. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya partai mayoritas di parlemen, sehingga pembentukan pemerintahan sangat bergantung pada koalisi antarpartai.

Namun, koalisi yang terbentuk cenderung bersifat pragmatis dan tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, melainkan kepentingan jangka pendek untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Hal ini berdampak pada lemahnya konsolidasi politik serta menurunnya efektivitas pemerintahan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Fragmentasi juga memperumit proses pengambilan keputusan karena adanya tarik-menarik kepentingan antarpartai (Suhantoro et al., 2025). Dengan demikian, fragmentasi tidak hanya menjadi fenomena struktural, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Faktor Penyebab Fragmentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kepartaian di Indonesia dipengaruhi oleh faktor institusional dan internal partai. Dari sisi institusional, sistem pemilu proporsional terbuka memberikan peluang besar bagi partai-partai kecil untuk memperoleh kursi di parlemen. Ambang batas parlemen yang relatif rendah semakin memperbesar kemungkinan masuknya banyak partai ke dalam sistem politik, sehingga memperkuat tingkat fragmentasi.

Di sisi lain, lemahnya institusionalisasi partai politik menjadi faktor krusial. Banyak partai tidak memiliki ideologi yang kuat serta bergantung pada figur elit tertentu. Kondisi ini menyebabkan partai rentan mengalami konflik internal dan perpecahan, yang pada akhirnya melahirkan partai-partai baru. Fragmentasi yang terjadi bukan hanya akibat desain sistem pemilu, tetapi juga karena kegagalan partai dalam membangun organisasi yang solid dan berkelanjutan (Ahmad, 2025; Lubis & Ramadhan, 2025).

Dengan demikian, fragmentasi kepartaian di Indonesia merupakan hasil interaksi antara sistem politik yang permisif dan lemahnya kapasitas kelembagaan partai.

Krisis Representasi Politik

Fragmentasi kepartaian berkontribusi langsung terhadap munculnya krisis representasi politik. Penelitian ini menemukan bahwa meningkatnya jumlah partai tidak serta-merta meningkatkan kualitas representasi, melainkan justru memperlemah hubungan antara rakyat dan wakil politiknya. Masyarakat semakin merasa bahwa aspirasi mereka tidak terakomodasi secara efektif dalam proses politik.

Krisis representasi ini diperparah oleh dominasi elit dalam tubuh partai politik. Proses pengambilan keputusan sering kali lebih mencerminkan kepentingan elit dibandingkan kepentingan publik. Akibatnya, partai politik kehilangan fungsi utamanya sebagai saluran aspirasi masyarakat dan bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan kelompok tertentu (Sandy et al., 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada jumlah partai, tetapi pada kualitas representasi yang dihasilkan oleh partai politik tersebut.

Dampak terhadap Demokrasi

Fragmentasi kepartaian dan krisis representasi memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah menurunnya efektivitas pemerintahan akibat sulitnya mencapai konsensus dalam koalisi multipartai. Kebijakan publik yang dihasilkan sering kali bersifat kompromistis dan tidak optimal dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Selain itu, fragmentasi juga mendorong berkembangnya praktik politik transaksional. Dukungan politik dalam parlemen kerap diperoleh melalui negosiasi kepentingan jangka pendek, yang berpotensi meningkatkan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran demokrasi dari yang bersifat substantif menuju demokrasi prosedural yang lebih berorientasi pada kekuasaan daripada kepentingan rakyat (Irwin et al., 2025; Noer, 2025).

Dengan demikian, fragmentasi kepartaian tidak hanya berdampak pada struktur politik, tetapi juga pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Reformasi Kepartaian

Untuk mengatasi permasalahan fragmentasi dan krisis representasi, diperlukan reformasi sistem kepartaian yang komprehensif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan jumlah partai melalui peningkatan ambang batas parlemen, sehingga hanya partai dengan dukungan signifikan yang dapat masuk ke parlemen.

Selain itu, penguatan kelembagaan partai menjadi hal yang sangat penting. Partai politik perlu membangun struktur organisasi yang kuat, memiliki ideologi yang jelas, serta menerapkan demokrasi internal secara konsisten. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai, khususnya terkait pendanaan dan proses pengambilan keputusan, juga harus ditingkatkan untuk memulihkan kepercayaan publik (Saputra et al., 2024; Susanto & Michael, 2023).

Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi fragmentasi, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas representasi politik dalam sistem demokrasi.

Relevansi dalam Konteks Indonesia Modern

Fenomena fragmentasi kepartaian dan krisis representasi masih sangat relevan dalam konteks politik Indonesia saat ini. Meskipun telah terjadi berbagai upaya reformasi, jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu tetap relatif banyak, menunjukkan bahwa tingkat fragmentasi masih tinggi.

Di era digital, krisis representasi semakin terlihat melalui meningkatnya kritik publik terhadap elit politik di media sosial. Masyarakat semakin vokal dalam mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kinerja partai politik, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara representasi formal dan aspirasi nyata masyarakat. Kondisi ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai konsolidasi yang matang (Irwin et al., 2025).

KESIMPULAN

Pertama, sistem kepartaian di Indonesia pasca reformasi mengalami tingkat fragmentasi yang tinggi akibat munculnya banyak partai politik dengan kekuatan yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem multipartai yang terbuka memang memberikan ruang bagi keberagaman aspirasi, namun di sisi lain juga menimbulkan ketidakstabilan politik. Fragmentasi yang berlebihan menyebabkan sulitnya membentuk pemerintahan yang solid serta memperlambat proses pengambilan kebijakan publik. Kedua, faktor utama yang menyebabkan fragmentasi dan melemahnya kualitas sistem kepartaian meliputi sistem pemilu proporsional terbuka, lemahnya institusionalisasi partai, serta dominasi elit atau oligarki dalam tubuh partai politik. Selain itu, banyak partai yang tidak memiliki ideologi yang kuat dan hanya berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek. Kombinasi faktor-faktor tersebut memperkuat persaingan tidak sehat antar partai dan memperburuk kualitas demokrasi. Ketiga, fragmentasi kepartaian berdampak langsung pada krisis representasi politik, di mana partai politik gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Hal ini tercermin dari menurunnya kepercayaan publik serta meningkatnya apatisme politik masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan legitimasi demokrasi dan berpotensi

mengurangi partisipasi politik serta kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Keempat, diperlukan upaya reformasi sistem kepartaian untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain melalui penyederhanaan jumlah partai, penguatan kelembagaan dan ideologi partai, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pembenahan regulasi dan demokrasi internal partai menjadi langkah penting untuk mengurangi dominasi oligarki dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, sistem kepartaian di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan stabil.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, S., & Arsil, F. (2022). Mekanisme penetapan ambang batas (threshold) terhadap stabilitas sistem presidensial dan sistem multipartai sederhana di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1202>
- Ahmad, Z. (2025). Fragmentasi politik reposisi partai dalam pencarian format ideal pasca reformasi. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 83–97. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i2.4765>
- Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., Raffiudin, R., & Judijanto, L. (2024). *Sistem politik Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitriyana, R., & Muspawi, M. (2024). Peran latar belakang penelitian dalam mengembangkan kerangka teoritis kajian literatur. *Edu Research*, 5(4), 185–194. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i4.280>
- Irwin, D., Erwiansyah, M. D., Khairullah, D., & Fartini, A. (2025). Dinamika hukum konstitusi dan tantangan praktik demokrasi di Indonesia: Studi kritis terhadap oligarki politik dan reformasi sistem pemilu. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(4), 1327–1338. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1782>
- Judijanto, L., Mila, J., Apriyanto, H., Ariesmansyah, A., Arifin, R. K., Vaughan, R., Indrianie, M., Nadila, D., & Aziz, Y. M. A. (2025). *Sistem politik Indonesia*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Juita, F., Effendi, M., & Maryam, S. (2025). *Buku ajar mata kuliah metode penelitian kualitatif: Penelitian kualitatif untuk menilik berbagai fenomena sosial*. Penerbit NEM.
- Lubis, S., & Ramadhan, A. N. (2025). Analisis kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 6(2), 21–46. <https://doi.org/10.33822/jpds.v6i2.10878>
- M., M., Z., A., ST, & Hudha, S. (n.d.). *Panduan lengkap metodologi penelitian: Dari teori hingga aplikasi*. Penerbit Adab.
- Noer, H. H. (2025). Patologi kelembagaan demokrasi elektoral: Korupsi politik di Indonesia pasca-reformasi. *AEGIS: Journal of International Relations*, 9(1). <https://doi.org/10.33021/aegis.v9i1.6285>
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 793–800.
- Prayugo, A., & Dora, H. C. (2024). Comparison of party systems and election: Old and new order political parties in Indonesia. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 1(3), 300–312.
- Prayugo, A., & Dora, H. C. (n.d.). *Perbandingan sistem kepartaian dan pemilu: Partai politik orde lama dan baru di Indonesia*.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2026). *Manajemen partai politik*. Deepublish.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (n.d.). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Retrieved April 21, 2026, from <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>
- Rahayu, N. P., Ayuningsih, N., & Aulia, V. (2024). Partai politik dan representasi kepentingan: Analisis peran partai dalam mewakili beragam kelompok masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 558–569. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1572>
- Rohmandar, A. (2025). Identifikasi praktik politik kartel dan kongkalikong di Indonesia: Analisis komprehensif terhadap fenomena oligarki politik kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 1990–1998.

- Salsabila, A. F. (2025, April 14). *Pelembagaan eksternal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung pada pemilihan umum 2024* [Skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. <https://digilib.unila.ac.id/93783/>
- Sandy, R., Algibran, A., Habibie, B. R., & Rahmawati, N. (2024). Peran partai politik terhadap kekuasaan legislatif. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.21067/jph.v9i1.9415>
- Saputra, M., Setiadi, W., & Thohari, A. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2, 204–222. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1531>
- Silitonga, M. P., & Gaol, H. M. L. (2025). Fungsi partai dalam parlemen. *Jurnal Hukum To-Ra*, 11(3), 646–660. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i3.627>
- Subakti, H., Hurit, R., Eni, G., Yufrinalis, M., Maria, S., Adwiah, R., Syamil, A., Mbari, M., Putra, S., Solapari, N., Musriati, T., & Putra, A. P. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Suhantoro, Imamia, A., Zehro, A. I., Sjarif, E. I., Rizkiyah, T., Jennah, R., & Rusdani, Z. (2025). *Strategi dan kebijakan publik dalam dinamika politik Indonesia*. Kramantara JS.
- Susanto, H., & Michael, T. (2023). Akuntabilitas dan justifikasi peningkatan dana negara terhadap partai politik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10421434>.